





## Latar Belakang

Sampai dengan tahun 2022 terdapat 2.873.505 unit kendaraan bermotor yang telah terdaftar. Jumlah data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Kalimantan Timur adalah 149.910 unit atau sebesar Rp. 116.085.190.554,-. Data objek kendaraan bermotor belum menggambarkan kondisi aktual potensi Pajak Kendaraan Bermotor sehingga perlu pendataan status kendaraan dan inovasi berbasis digital yang dapat memutakhirkan data kendaraan bermotor





## Tujuan

#### **JANGKA PENDEK**

Menyediakan data tunggakan kendaraan bermotor dengan kejelasan status antara lain: aktif, rusak berat, hilang, lapor jual, alamat tidak jelas, untuk data tunggakan tahun 2022 ke bawah.

#### **JANGKA PANJANG**

- 1. Mengoptimalkan perhitungan perencanaan Pendapatan Asli Daerah yang terintregasi melalui Aplikasi pendataan status (sensus) kendaraan bermotor.
- 2. Menyediakan data tunggakan kendaraan bermotor dengan kejelasan status di seluruh UPTD PPRD (Samsat) se Kalimantan Timur secara berkelanjutan





## Manfaat

#### **Manfaat Eksternal:**

- Membantu dalam penegakan hukum terkait kepemilikan dan pengguna kendaraan, dengan informasi yang tepat instansi berwenang dapat menindak dengan tepat sesuai dengan pelanggarannya.
- Membantu otoritas perhubungan dalam rangka memantau kondisi dan kinerja armada kendaraan di jalan raya

### **Manfaat Internal:**

- Dapat mengetahui potensi pendapatan Pajak yang berasal dari hasil identifkasi status data kendaraan bermotor aktif potensi.
- Tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan data kendaraan bermotor
- Mempermudah tugas UPTD PPRD (samsat) sebagai eksekutor dalam mengintegrasikan data status kendaraan bermotor.
- Solusi digital untuk pencatatan dan verifikasi status kendaraan bermotor



## Tahapan Kegiatan



#### Persiapan

- 1. Konsultasi Ke Mentor
- Pembuatan SK Tim Aksi Perubahan
- 3. Rapat Persiapan Pelaksanaan Aksi Perubahan
- 4. Permintaan Surat Dukungan

#### Pelaksanaan

- Rapat KoordinasiPembuatan Aplikasi
- 2. Pembuatan Aplikasi
- 3. Penyusunan Manual Book dan SOP
- Koordinasi dengan Diskominfo

- 5. Uji Coba Aplikasi
- 6. Rakor/FGD dengan Instansi Terkait
- 7. Sosialisasi ke
  Pelaksana UPTD
  PPRD Bapenda
- 8. Impementasi
  Pendataan Status
  (Sensus) Kendaraan
  Bermotor

#### **Evaluasi**

- 1. Analisa Hasil Pendataan (laporan)
- 2. Konsultasi Dengan Mentor













## Tahap Evaluasi

Sistem Pendataan Status (SiPesat) Kendaraan Bermotor menyajikan data tunggakan Tahun 2016 hingga Tahun 2022 dengan jumlah kendaraan sebanyak 802.863 unit, setelah dilaksanakan pendataan status selama kurang lebih 2 (dua) minggu yang dimulai pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh petugas UPTD PPRD Bapenda se Kaltim didapatkan data pada aplikasi per tanggal 4

Agustus 2023 sebagai berikut:

Berdasarkan dashboard aplikasi setelah dilakukan pendataan status dilapangan terdata sebanyak 18.943 unit atau sebesar 2,36% dari total data tunggakan.









## Tahap Evaluasi



62,48% = Potensi untuk dilakukan penagihan lanjutan

**37,52% = Potensi hilang pajak** 

Hasil pendataan status tersebut dapat dianalisa lebih mandalam untuk dijadikan bahan kebijakan lebih lanjut dalam upaya optimalisasi peningkatan PAD dan pelaksanaan penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Kalimantan Timur.





KOMPATIBILITAS DENGAN SISTEM SAMSAT





# Kesimpulan

Implementasi Aksi Perubahan merubah pendataan secara manual menjadi pendataan secara digital dengan menggunakan Aplikasi SiPESAT RANMOR yang dapat meningkatakn efektivitas dan efisiensi dalam pendataan yang mendapat dukungan dan kerja sama stakeholder dalam mendapatkan data yang aktual.

Pendataan status tunggakan kendaraan bermotor dapat menggambarkan potensi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara riil yang akan menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Prov. Kalimantan Timur, selain itu, hasil pendataan status tunggakan dapat dijadikan acuan untuk menghitung proyeksi perencanaan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari Pendataan Status (Sensus) Kendaraan Bermotor ini juga akan menjadi data gambaran ekonomi pemerintah provinsi Kalimantan Timur yang menjafi dasar dalam memutuskan kebijakan.



## Saran

Agar implementasi aksi perubahan ini dapat mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan maka harus didukung dengan penguatan regulasi pelaksanaan dan tata kelola kegiatan, konsisten dijalankan serta harus dievaluasi secara berkala.

Pelaksanaan aksi perubahan ini kedepannya tidak hanya terbatas pada data tunggakan sehingga pendataan status kendaraan bermotor dapat dilakukan secara menyeluruh dan dapat menjad dasar konkrit dalam mengambil kebijakan.

Peran serta staeholder dalam pendataan status juga diperlukan agar proses pendataan yang dilakukan dapat berjalan efektif dan efisien dan data yang digunakan merupakan data yang aktual.





# TERIMA KASIH